

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, UKURAN
PERUSAHAAN, DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP
EFFECTIVE TAX RATE (ETR)**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2011-2013)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

MOHAMMAD DANU BACHTIAR

NIM. 12030111140245

**AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Mohammad Danu Bachtiar
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111140245

Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN,
UKURAN PERUSAHAAN, DAN *CAPITAL
INTENSITY* TERHADAP *EFFECTIVE TAX
RATE* (ETR) (Studi Empiris pada Perusahaan
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2011-2013)**

Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt.

Semarang, 26 Agustus 2015

Dosen Pembimbing,

(Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt.)

NIP. 195805251991032001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Mohammad Danu Bachtiar

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111140245

Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, UKURAN PERUSAHAAN, DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP *EFFECTIVE TAX RATE* (ETR) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 8 September 2015

Tim Penguji:

1. Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt. (.....)
2. Puji Harto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D. (.....)
3. H.M. Didik Ardiyanto, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Mohammad Danu Bachtiar, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan *Capital Intensity* Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 26 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan,

(Mohammad Danu Bachtiar)

NIM : 12030111140245

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”

-Qs. Al-Baqarah : 216

“Don't stop when you are tired, stop when you are done”

-Anonim

Berusaha dengan sungguh-sungguh itu seperti makan *dark chocolate*. Awalnya mungkin akan terasa pahit tapi insya Allah akhirnya akan terasa manis, itu lah yang membuatnya lebih berkesan.

-Penulis

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Kedua orang tua, adik, kakak, serta semua orang yang telah mendukung dan mendoakan saya selama ini.

ABSTRACT

This study aims to examine empirically the influence of ownership structure (managerial ownership, institutional ownership, public ownership), firm size, and capital intensity to effective tax rate (ETR).

The population of this research was all companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2011-2013. Sampling was done by using purposive sampling method. There were 137 companies that fulfilled the criteria of sampling. This study used multiple linear regression analysis to examine the influence of independent variables on the dependent variable.

The results of this study showed that the variable of public ownership have negative significant influence to the effective tax rate. Capital intensity showed a positive significant relationship to the effective tax rate. Meanwhile variable managerial ownership, institutional ownership and firm size did not significantly influence the effective tax rate.

Keyword: *Effective tax rate, managerial ownership, institutional ownership, public ownership, firm size, capital intensity*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan publik), ukuran perusahaan, dan *capital intensity* terhadap *effective tax rate* (ETR).

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2013. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Terdapat 137 perusahaan yang memenuhi kriteria pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan publik secara signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate*. Variabel *capital intensity* menunjukkan hubungan yang positif signifikan terhadap *effective tax rate*. Sedangkan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*.

Kata kunci: *Effective tax rate*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional,

kepemilikan publik, ukuran perusahaan, *capital intensity*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan *Capital Intensity* Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013)”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program S1 (Strata 1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, saran dan doa serta fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua penulis, Eddy Moeis (Alm) dan Sri Rahayu Tjiptowaty yang menjadi sumber inspirasi, semangat, dan kekuatan penulis. Terima kasih karena selalu mendoakan dan senantiasa mencurahkan kasih sayang, memberikan semangat, dukungan, nasihat, dan motivasi bagi penulis.
2. Dr. Suharnomo, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

3. Prof. Dr. Muhammad Syafruddin, M.Si., Akt. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
4. Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. H. Raharja, M.Si., Akt. Selaku Dosen Wali yang telah membantu dalam konsultasi selama perkuliahan.
6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang khususnya Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kakak dan Adik penulis, Mohammad Aldino Bahtiar dan Diana Amira Widyawati yang selalu membuat kesal ketika bersama tapi dirindukan ketika berpisah. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan.
8. Wak Niti (Alm), Wak Nining, Wak Anang, Wak Ino, Beh, Ibu serta seluruh keluarga besar Abdul Moeis Bachtiar dan Soetjipto Danoe Sapoetro. Terima kasih atas semua bentuk dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
9. Pasukan GEMBEL (Akmal, Alex, Axel, Alif, Alvine, Bahrul, Bani, Ciwul, Codot, Danand, Despa, Faiz, Fajar, Fika, Galuh, Habib, Sulam, Hermas, Ical, Iis, Webe, Jollifi, Kezia, Gati, Muadz, Nanang, Niko, Oo, Pepi, Pitri, Rainer, Reza, Risha, Roy, Rusdan, Adit, Majid, Anice, Kawin, Wempy,

dan lain lainnya) yang selalu menemani hari hari perkuliahan dan Jalan Jalan yang nggak pernah berhenti. Terima kasih telah membuat masa kuliah ini menjadi berwarna.

10. Grup Sopem and Re (Alvine, Rainer, Reza, Niko, Codot, Jollifi, Risha, Oo, Muadz). Terima kasih karena selalu menjadi tempat untuk kembali ke Semarang.
11. Kontrakan Sapari (Hermas, Alex, Bani, dan Nanang) yang telah menjadi tempat singgah dan cerita penulis selama kuliah. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya.
12. MUADZ, Mahasiswa Undip Anak Didik ibu Zulaikha (Reza, Niko, Jollifi, Adit, Anyak, Reny, Nutfi, dan Aulia) yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi tentang skripsi bersama penulis.
13. Tasya, Oci, Iput, Lisa, Anyak, Rita, Alif, Bahrul, Pepi, Akmal, Ipeh. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis terutama selama pengerjaan skripsi.
14. Teman-teman Akuntansi Undip 2011 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kekompakannya selama masa perkuliahan.
15. Sahabat-sahabat sejak SMA dan masih hingga saat ini. Yoga, Agah, Lury, Sandy, Dila, Pudu, Sheryn dan damni lainnya. Anak-anak TOHA, Jombi, Panjul, Opay, Alay, Anto, Bagus, Tebe, Gonjol, Haris, Rozi, Syauqi, Jon dll. Teman bercerita, Via, Fadia, Innez. Terima kasih atas dukungan dan semangat selama ini dan tetap menjadi teman terdekat bagi penulis.

16. Teman-teman merantau Moonzher 23. Iban, Nanda, Bimo, Ulian, Cilot, Alay, Haris, Tebe, Agan, Thias, Billy, Bayu, Uti, Fofu, Dea, Melis, Greena, Anti, Shinta. Terima kasih karena menjadi teman senasib untuk beradaptasi di Semarang.
17. Penghuni Kost 32 yang telah menjadi tempat berbagi setiap hari, terima kasih atas kekeluargaannya selama ini.
18. Keluarga KKN Undip Tim 2 Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara (Aji, Habib, Rizky, Bianda, Agung, Galih, Dwi, Rendy, Mei, Tutuk, Nindy, Lilis, Iis, Nita) yang telah menjadi keluarga selama sebulan penuh. Terima kasih atas kisah selama KKN.
19. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 26 Agustus 2015

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TELAAH PUSTAKA	13

2.1	Landasan Teori	13
2.1.1	Teori Keagenan	13
2.1.2	Effective Tax Rate (ETR).....	15
2.1.3	Struktur Kepemilikan	18
2.1.4	Ukuran Perusahaan.....	25
2.1.5	<i>Capital Intensity</i>	26
2.2	Penelitian Terdahulu	27
2.3	Kerangka Pemikiran	32
2.4	Perumusan Hipotesis.....	34
2.4.1	Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap <i>Effective Tax Rate</i>	34
2.4.2	Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Effective Tax Rate</i>	35
2.4.3	Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap <i>Effective Tax Rate</i>	37
2.4.4	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Effective Tax Rate</i>	38
2.4.5	Pengaruh Capital Intensity Terhadap <i>Effective Tax Rate</i>	39
BAB III METODE PENELITIAN.....		41
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	41
3.1.1	Variabel Dependen	41
3.1.2	Variabel Independen.....	41

3.2	Populasi dan Sampel.....	44
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	45
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	46
3.5	Metode Analisis	46
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	46
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	46
3.5.3	Pengujian Hipotesis	50
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN		53
4.1	Deskripsi Variabel	53
4.2	Analisis Data.....	54
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	54
4.2.2	Uji Asumsi Klasik	57
4.2.3	Uji Hipotesis.....	64
4.3	Interpretasi Hasil.....	68
4.3.1	Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap ETR	68
4.3.2	Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap ETR.....	69
4.3.3	Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap ETR	70
4.3.4	Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap ETR	71
4.3.5	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap ETR.....	71
BAB V PENUTUP.....		73

5.1 Kesimpulan	73
5.2 Keterbatasan.....	74
5.3 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4.1 Perincian Sampel.....	54
Tabel 4.2 Statistik Diskriptif	55
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi	55
Tabel 4.4 Uji Kolmogorov-Smirnov	59
Tabel 4.5 Uji Kolmogorov-Smirnov 2.....	60
Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas.....	61
Tabel 4.7 Pengujian autokorelasi Durbin Watson.....	62
Tabel 4.8 Nilai Durbin Watson	62
Tabel 4.9 Uji Glejser	64
Tabel 4.10 Koefisien Determinasi.....	65
Tabel 4.11 Uji Statistik F	65
Tabel 4.12 Uji Statistik t	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar 3.1 Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Korelasi.....	49
Gambar 4.1 Uji Normalitas Residual	58
Gambar 4.2 Uji Normalitas Residual 2	59
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Daftar Sampel Perusahaan.....	80
Lampiran B	Hasil Uji Statistik.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat yang wajib dibayarkan kepada negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak memiliki pengaruh besar dalam pembangunan nasional karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Dalam ketentuan pungutannya, pungutan pajak telah diatur oleh Undang-Undang seperti yang dinyatakan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III. Pasal tersebut berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Iuran wajib dari rakyat tersebut nantinya akan kembali kepada rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung karena pajak digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas publik yang berguna bagi kepentingan umum.

Untuk meningkatkan perekonomian, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan antara lain melalui penurunan tarif pajak badan yang ditetapkan oleh pemerintah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

pasal 17 ayat (1) huruf b yang berisi tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Pemerintah kemudian melakukan perubahan tarif pajak badan yang diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a) yang berisi tarif pajak penghasilan wajib pajak badan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Upaya untuk meningkatkan perekonomian juga dilakukan melalui peningkatan dalam pasar modal yang merupakan sumber pembiayaan dunia usaha. Untuk itu pemerintah memberikan insentif pajak berupa fasilitas PPh bagi WP badan dalam negeri yang berupa Perseroan Terbuka. Hal tersebut diatur oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b) yang berbunyi:

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Persyaratan tertentu lainnya yang dimaksud adalah saham perusahaan tersebut paling sedikit dimiliki oleh 300 pihak, masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor, dan ketentuan tersebut harus dipenuhi dalam waktu minimal 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun pajak (Direktorat Peraturan Perpajakan II, 2012).

Dari sisi perusahaan pajak merupakan sesuatu yang sebisa mungkin diminimalisir atau bahkan dihindari. Untuk meminimalisir pajak tertanggung,

perusahaan akan mendorong manajemennya untuk lebih memperhatikan pajak. Umumnya perusahaan melalui manajemen akan melakukan *tax planning* yang dapat menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan baik dengan cara legal maupun cara ilegal. Cara ilegal untuk meminimalisir tanggungan pajak adalah dengan cara penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi bahkan menghilangkan beban pajak atau lebih dikenal sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan cara legal untuk meminimalisir tanggungan pajak adalah dengan cara memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak atau yang lebih dikenal sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Wijaya, 2014).

Manajer selaku orang yang dipekerjakan oleh perusahaan memiliki tanggung jawab kepada para pemilik perusahaan atau para pemegang saham perusahaan untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Menurut Ali *et. al* (2008) Manajer bertanggung jawab untuk menggunakan sumber daya di perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemilik dengan cara menaikkan nilai perusahaan maupun kinerja perusahaan. Manajer akan berusaha memuaskan para pemegang saham dengan memaksimalkan laba. Namun, dengan semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka beban pajak yang harus ditanggung perusahaan juga semakin besar. Untuk dapat memaksimalkan laba tetapi dengan beban pajak yang lebih rendah manajer melakukan perencanaan pajak, baik dengan menggunakan *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Semakin rendah pajak yang harus dibayarkan

perusahaan, maka kinerja manajemen akan dianggap semakin baik oleh para pemegang saham karena dengan berkurangnya beban pajak perusahaan akan meningkatkan laba setelah pajak perusahaan. Laba yang meningkat tersebut tentu akan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Namun, menurut Sabli dan Noor (2012) manajer dari suatu perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak sebagai aktivitas *tax sheltering* untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri dan bukan untuk kepentingan prinsipal (pemegang saham).

Effective tax rate (ETR) dapat digunakan sebagai indikator perencanaan pajak yang efektif. Menurut Kern dan Morris (1992), Gupta dan Newberry (1997) (dikutip dari Richardson dan Lanis, 2007) *effective tax rate* (ETR) perusahaan sering digunakan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai salah satu acuan untuk membuat sistem pajak perusahaan karena *effective tax rate* menyediakan ringkasan statistik dari efek kumulatif berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan. Menurut Richardson dan Lanis (2007) *effective tax rate* (ETR) adalah fungsi dari rasio insentif pajak terhadap *book income*, di mana insentif pajak (misalnya depresiasi) adalah hal yang menyebabkan *book income* berbeda dari penghasilan kena pajak.

Effective tax rate (ETR) menunjukkan proporsi atau persentase beban pajak yang ditanggung perusahaan terhadap laba sebelum pajak. Hal ini menjadi menarik karena setiap perusahaan yang memiliki peredaran bruto atau penjualan di atas Rp 50 milyar dikenakan tarif pajak yang sama yaitu 25% dari penghasilan kena pajak perusahaan. Namun, jika dibandingkan dengan laba sebelum pajak/laba akuntansi perusahaan akan menunjukkan persentase yang berbeda untuk

setiap perusahaan. Dengan demikian *effective tax rate* dapat digunakan untuk mengukur perencanaan pajak yang efektif karena *effective tax rate* mengukur jumlah pajak yang ditanggung perusahaan terhadap laba sebelum pajak/laba akuntansi perusahaan sehingga perusahaan dapat mengetahui kinerja manajemen pajaknya.

Perbedaan laba menurut akuntansi dan perpajakan terjadi karena perbedaan peraturan mengenai akuntansi dan perpajakan. Pengakuan terhadap pendapatan dan beban menurut akuntansi diatur oleh PSAK. Sementara itu pengakuan terhadap pendapatan dan beban menurut perpajakan diatur oleh Undang-Undang. Perbedaan pengakuan terhadap pendapatan dan beban dalam pajak dan akuntansi menyebabkan terjadinya perbedaan permanen dan perbedaan temporer dalam aturan perpajakan. Perbedaan permanen adalah perbedaan pengakuan pajak yang timbul karena terjadi transaksi-transaksi pendapatan dan biaya yang diakui menurut akuntansi, tetapi menurut perpajakan tidak diakui. Perbedaan temporer adalah perbedaan pengakuan pajak yang timbul karena adanya perbedaan antara jumlah aset atau liabilitas tercatat pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya (Martani, 2012).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam pembayaran pajak, seperti struktur kepemilikan. Menurut Mahenthiran dan Kasipillai (2012) jika dalam struktur kepemilikan perusahaan dimiliki oleh manajerial, maka manajer akan berupaya mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan selama beberapa tahun. Namun, menurut Ali *et al.* (2008) manajer cenderung berupaya untuk memaksimalkan nilai

perusahaan dan dorongan untuk memanipulasi laba (termasuk meningkatkan laba dan menurunkan beban pajak) akan berkurang ketika kepemilikan saham manajerial dalam sebuah perusahaan tinggi.

Struktur kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh institusional akan mempengaruhi pembayaran pajak. Pemegang saham institusional akan mempengaruhi perusahaan agar lebih agresif pajak dalam upaya memaksimalkan laba setelah pajak dan arus kas setelah pajak dan pihak institusi sebagai pemegang saham akan fokus pada kinerja jangka pendek yang mendorong manajer membuat keputusan untuk meningkatkan laba jangka pendek (Khurana dan Moser, 2009).

Semakin berkurangnya komposisi kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional serta meningkatnya kepemilikan publik akan berpengaruh terhadap naiknya nilai perusahaan (Nur'aeni, 2010). Dengan lebih besarnya kepemilikan publik dalam suatu perusahaan, maka akan mendorong manajemen lebih transparan sehingga perusahaan tidak dikendalikan untuk memenuhi kepentingan kalangan tertentu. Namun, dengan adanya fasilitas perpajakan yang dapat menurunkan tarif pajak perusahaan jika paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor perusahaan diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, saham perusahaan tersebut paling sedikit dimiliki oleh 300 pihak, dan masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor akan membuat kepemilikan publik dalam sebuah perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya terdapat hasil yang berbeda mengenai hubungan antara ukuran perusahaan dengan *effective tax rate* (ETR). Menurut Richardson dan Lanis (2007) sebuah perusahaan yang lebih besar mungkin menjadi lebih agresif pajak dari pada perusahaan yang ukurannya lebih kecil karena perusahaan besar menguasai kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar. Sementara terdapat penelitian lain yang menyebutkan bahwa perusahaan yang berskala besar membayar pajak lebih besar daripada perusahaan berskala kecil. Berdasarkan teori *political cost*, visibilitas yang lebih tinggi dari perusahaan yang lebih besar dan lebih sejahtera menyebabkan perusahaan tersebut menjadi korban tindakan regulasi yang lebih besar oleh pemerintah (Watts and Zimmerman, 1986 dikutip dari Richardson dan Lanis, 2007).

Penelitian lain juga menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *effective tax rate* (ETR). Gupta dan Newberry (1997) (dikutip dari Noor *et al.*, 2010) mengungkapkan bukti bahwa perusahaan dengan proporsi aktiva tetap yang lebih besar cenderung memiliki ETR yang lebih rendah karena adanya ketentuan *capital allowance*. Rodriguez dan Arias (2012) (dikutip dari Ardyansah, 2014) menyatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Namun, penelitian Darmadi dan Zulaikha (2013) menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif signifikan terhadap ETR.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sabli dan Noor (2012). Penelitian ini menguji hubungan antara struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan

publik), ukuran perusahaan, dan *capital intensity* terhadap *effective tax rate* (ETR) perusahaan.

Penelitian ini menggunakan *effective tax rate* sebagai variabel dependen bukannya perencanaan pajak atau penghindaran pajak yang merupakan interpretasi dari *effective tax rate* adalah karena terdapat variabel kepemilikan publik. Perusahaan yang memiliki kepemilikan publik yang tinggi tidak dapat dikaitkan dengan penghindaran pajak karena perusahaan memerlukan sumber dana yang besar. Salah satu sumber pendanaan perusahaan didapat dengan menjual saham ke publik. *Effective tax rate* mencerminkan persentase pajak bersih yang dibayarkan perusahaan.

Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya seperti Mahenthiran dan Kasipillai (2012), Vieira (2013) hanya berfokus pada kepemilikan manajerial yang merupakan mekanisme tata kelola perusahaan dari dalam perusahaan sedangkan penelitian dari Khurana dan Moser (2009), Sabli dan Noor (2012), Sartaji dan Hassanzadeh (2014) hanya berfokus pada kepemilikan institusional yang merupakan mekanisme tata kelola perusahaan dari luar perusahaan. Dalam penelitian ini ditambahkan variabel kepemilikan publik sehingga bersama dengan variabel kepemilikan manajerial dan variabel kepemilikan institusional menjadikan struktur kepemilikan perusahaan sebagai variabel independennya.

1.2 Rumusan Masalah

Pajak merupakan salah satu perhatian utama pemerintah karena pajak adalah pendapatan terbesar bagi negara. Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk dapat meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Pemerintah memberikan fasilitas berupa insentif pajak kepada para pelaku usaha dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional, maka penerimaan negara dari pajak juga akan meningkat. Namun, terdapat perbedaan sudut pandang antara pemerintah dan perusahaan. Perusahaan sebagai wajib pajak melihat pajak sebagai beban yang sebisa mungkin untuk dihindari. Perusahaan akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengenai pajak antara lain struktur kepemilikan, ukuran perusahaan dan *capital intensity*.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki perbedaan temuan. Mahenthiran dan Kasipillai (2012) menemukan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap ETR sedangkan menurut Ali *et al.* (2008) semakin besar kepemilikan manajerial akan menurunkan agresivitas pajak perusahaan. Khurana dan Moser (2009) menemukan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap ETR sedangkan Bird dan Karolyi (2015) menemukan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ETR. Richardson dan Lanis (2007) menemukan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap ETR sedangkan Zimmerman (1983) (dikutip dari Richardson dan Lanis, 2007)

menemukan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ETR. Richardson dan Lanis (2007) menemukan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap ETR sedangkan Wahab dan Holland (2012) menemukan *capital intensity* memiliki pengaruh negatif terhadap perencanaan pajak

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap *effective tax rate* (ETR)?
2. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate* (ETR)?
3. Apakah kepemilikan publik memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate* (ETR)?
4. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate* (ETR)?
5. Apakah *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *effective tax rate* (ETR)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan menemukan bukti secara empiris mengenai:

1. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *effective tax rate* (ETR).
2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *effective tax rate* (ETR).
3. Pengaruh kepemilikan publik terhadap *effective tax rate* (ETR).

4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *effective tax rate* (ETR).
5. Pengaruh *capital intensity* terhadap *effective tax rate* (ETR).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi sebuah tambahan literatur yang memberikan bukti empiris terkait dengan struktur kepemilikan, ukuran perusahaan dan *capital intensity* dengan *effective tax rate* yang bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sikap perusahaan di Indonesia mengenai kewajiban membayar pajak.
3. Bagi penulis, penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang peraturan perpajakan pada perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini digunakan untuk memberi kemudahan dalam pembahasan penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data yang digunakan, dan pembahasan dari analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Dalam teori keagenan dinyatakan bahwa terdapat hubungan antara pihak pemberi wewenang (prinsipal) dengan pihak yang diberikan wewenang (agen). Menurut Anthony dan Govindarajan (2009) hubungan keagenan terjadi ketika satu pihak (prinsipal) mempekerjakan pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan memberikan pihak lain tersebut wewenang untuk mengambil keputusan. Dalam sebuah perusahaan prinsipal adalah pemilik saham yang memberikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada manajer perusahaan selaku agen.

Manajer (agen) sebagai pihak yang diberi wewenang oleh pemilik saham (prinsipal) memiliki tanggung jawab untuk dapat menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan dan menghasilkan tingkat *return* yang tinggi untuk pemilik saham. Namun, menurut Anthony dan Govindarajan (2009) bahwa berdasarkan teori keagenan setiap individu akan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri. Seperti sifat dasar manusia yang hanya mementingkan dirinya sendiri.

Manajer sebagai orang yang menjalankan perusahaan akan memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan dibandingkan informasi yang dimiliki

oleh pemilik saham. Ketidaktepatan penyebaran informasi yang ada antara informasi yang dimiliki manajer dengan informasi yang dimiliki pemilik saham ini memunculkan suatu kondisi yang disebut asimetri informasi (*information asymmetry*) (Rusydi dan Martani, 2014). Dengan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemilik saham akan mendorong manajer melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengejar kepentingan manajer semata.

Perbedaan tujuan antara manajer dan pemilik saham akan memunculkan masalah yang disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*). Prinsipal dapat meminimalisir perbedaan kepentingannya dengan memberikan insentif yang tepat untuk manajer dan juga melalui pengawasan yang dirancang untuk membatasi kegiatan manajer yang menyimpang. Namun, untuk melakukan pengawasan terhadap manajer diperlukan biaya yang disebut dengan biaya keagenan (*agency cost*).

Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan sebagai berikut:

1. Monitoring cost

Biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajer agar pekerjaan manajer tidak menyimpang dan juga dengan memberikan insentif yang tepat kepada manajer.

2. Bonding cost

Biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa dia tidak akan mengambil tindakan tertentu yang akan merugikan perusahaan dan juga prinsipal.

3. Residual loss

Biaya yang setara dengan pengurangan kesejahteraan dari prinsipal sebagai dampak dari adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal.

Tingkat pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat dipengaruhi oleh *agency problem*. Manajer akan berupaya untuk membuat laba perusahaan terlihat lebih besar agar kinerja manajer di mata pemilik saham menjadi baik. Dengan demikian, kompensasi yang diterima manajer atas kinerjanya juga akan meningkat. Namun, dengan tingginya laba perusahaan akan membuat pajak yang harus ditanggung perusahaan menjadi lebih besar. Hal ini tentu tidak diinginkan oleh para pemegang saham. Sesuai dengan yang disebutkan oleh Rusydi dan Martani (2014) terdapat perbedaan kepentingan antara kedua pihak, satu sisi manajer sebagai *agent* menginginkan peningkatan kompensasi, sementara pemegang saham ingin menekan biaya pajak.

2.1.2 Effective Tax Rate (ETR)

Menurut Noor *et al.* (2010) *effective tax rate* (ETR) sebenarnya merupakan ukuran beban pajak perusahaan karena mengungkapkan tingkat pajak yang dibayarkan terhadap laba perusahaan. *Effective tax rate* (ETR) dapat digunakan sebagai indikator perencanaan pajak yang efektif. Menurut Kern dan Morris (1992), Gupta dan Newberry (1997) (dikutip dari Richardson dan Lanis, 2007) *effective tax rate* (ETR) perusahaan sering digunakan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai salah satu acuan untuk membuat sistem pajak perusahaan karena *effective tax rate* menyediakan

ringkasan statistik dari efek kumulatif berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan.

Effective tax rate (ETR) merupakan rasio total beban pajak terhadap laba sebelum pajak perusahaan. Berdasarkan SFAS No. 109, Akuntansi Pajak Penghasilan, beban pajak terdiri dari jumlah beban pajak kini dan beban pajak tangguhan (Dyrenge *et al.*, 2007). Pajak kini merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode (Martani, 2012). Sedangkan pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh di masa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa yang akan datang yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu (Sari, 2005).

Menurut Walby (2010) membagi tarif pajak menjadi empat macam, yaitu

1. Tarif Pajak Statutori (*Statutory Tax Rate*)

Tarif pajak statutori adalah tarif pajak yang secara legal berlaku dan ditetapkan oleh otoritas perpajakan. Contoh dari tarif statutori adalah tarif PPh badan sebesar 25% untuk perusahaan yang memiliki peredaran bruto atau penjualan diatas Rp 50 Milyar.

2. Tarif Pajak Rata-Rata (*Average Tax Rate*)

Tarif pajak rata-rata adalah rasio jumlah pajak yang dibayarkan terhadap jumlah penghasilan kena pajak. Tarif pajak rata-rata akan menjadi berbeda dengan tarif pajak statutori ketika tarif pajak statutori

memiliki tarif yang bertingkat. Pada saat tersebut tarif pajak rata-rata akan lebih rendah daripada tarif pajak statutori. Contohnya adalah lapisan tarif PPh perseorangan yang memiliki tarif 5% sampai dengan 30%, akan tetapi mungkin tarif rata-ratanya berada pada tingkat 20%.

3. Tarif Pajak Marginal (*Marginal Tax Rate*)

Tarif pajak marginal adalah tarif pajak yang dikenakan atas sisa penghasilan kena pajak setelah dikenakan dengan tarif pajak sebelumnya. Contohnya penghasilan kena pajak seseorang sebesar Rp150.000.000,00. Tarif pajak yang berlaku adalah 5% untuk Rp0 - Rp50.000.000,00 dan tarif 15% berlaku untuk Rp50.000.000,00 - Rp250.000.000,00. Sisa Rp100.000.000,00 penghasilan orang tersebut akan dikenakan tarif sebesar 15%, dan 15% adalah tarif marginal.

4. Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate*)

Tarif pajak efektif adalah tarif pajak aktual yang harus dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak/laba akuntansi perusahaan.

Effective tax rate atau tarif pajak efektif pada penelitian ini digunakan sebagai variabel dependen. *Effective tax rate* (ETR) menunjukkan proporsi atau persentase beban pajak yang ditanggung perusahaan terhadap laba sebelum pajak/laba akuntansi perusahaan. Hal ini menjadi menarik karena tarif pajak yang berlaku atau tarif pajak statutori menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a) untuk setiap perusahaan adalah sama yaitu 25%. Namun, jika

dibandingkan dengan laba sebelum pajak/laba akuntansi perusahaan akan menunjukkan persentase yang berbeda untuk setiap perusahaan.

2.1.3 Struktur Kepemilikan

Dalam dunia bisnis sekarang, pengelolaan perusahaan semakin dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori keagenan (*agency theory*) yang menyatakan bahwa pemilik perusahaan (prinsipal) menyerahkan wewenang menjalankan perusahaan kepada tenaga profesional (agen) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis. Tujuan dipisahkannya pengelolaan dan kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik memperoleh keuntungan maksimal dengan biaya yang efisien.

Menurut Wicaksono (2000) (dikutip dari Nur'aeni, 2010) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam struktur kepemilikan, antara lain:

1. Kepemilikan sebagian kecil perusahaan oleh manajemen mempengaruhi kecenderungan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dibanding sekedar mencapai tujuan perusahaan semata.
2. Kepemilikan yang terkonsentrasi memberi insentif kepada pemegang saham mayoritas untuk berpartisipasi secara aktif dalam perusahaan.
3. Identitas pemilik menentukan prioritas tujuan sosial perusahaan dan maksimalisasi nilai pemegang saham, misalnya perusahaan milik pemerintah cenderung untuk mengikuti tujuan politik dibanding tujuan perusahaan.

Dalam penelitian ini struktur kepemilikan yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik.

2.1.3.1 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham oleh manajemen. Kepemilikan saham manajerial dapat menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer juga akan menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Pujiningsih, 2011). Dengan manajer merasakan sendiri dampak yang diakibatkannya dalam pengambilan keputusan, maka manajer akan lebih berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan pendapat Dempsey & Laber (1992) bahwa masalah keagenan banyak dipengaruhi oleh *insider ownership*. *Insider ownership* adalah pemilik perusahaan yang juga merupakan pengelola perusahaan. Semakin besar *insider ownership*, maka perbedaan kepentingan antara pemegang saham (pemilik) dengan pengelola perusahaan (manajemen) semakin kecil. Jika *insider ownership* dalam sebuah perusahaan kecil artinya jumlah pemegang saham yang terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan hanya sedikit sehingga kemungkinan terjadinya masalah keagenan akan semakin tinggi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan pengelola perusahaan yang semakin besar.

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham mengakibatkan timbulnya masalah yang biasa disebut *agency*

problem. Untuk mengurangi masalah antara manajer dan pemegang saham salah satunya dengan cara meningkatkan kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan. Cruthley dan Hansen (1989) (dikutip dari Wiranata dan Nugrahanti, 2013) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajer akan mendorong penyatuan kepentingan antara prinsipal dan agen sehingga manajer bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham diluar manajemen sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sebagai seorang pemilik (Jensen dan Meckling, 1976).

Itturiaga & Sanz (2000) (dikutip dari Nur'aeni, 2010) berpendapat bahwa struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan dengan dua sudut pandang yaitu melalui pendekatan keagenan (*agency approach*) dan pendekatan ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information approach*). Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai sebuah instrumen atau alat untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim (*claim holder*) terhadap perusahaan. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara *insider* dan *outsider* melalui pengungkapan informasi di dalam pasar modal.

2.1.3.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga antara lain seperti perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank ataupun perusahaan-perusahaan swasta lain. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajer (Jensen dan Meckling, 1976).

Dengan adanya investor institusional, pemegang saham mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan. Shleifer dan Vishny (1986) (dikutip dari Khurana dan Moser, 2009) menyatakan bahwa investor institusional memainkan peran penting dalam pengawasan, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Lebih lanjut, Shleifer dan Vishny (1986) (dikutip dari Khurana dan Moser, 2009) berpendapat bahwa investor institusional, dengan kepemilikan saham yang besar dan hak suara, dapat memaksa manajer untuk fokus pada kinerja perusahaan dan menghindari peluang untuk mementingkan kepentingan pribadinya, investor institusional juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa perusahaan mengambil keputusan-keputusan yang akan memaksimalkan kekayaan pemegang saham.

Investor institusional dapat mempengaruhi manajemen perusahaan dan dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Hal tersebut disebabkan jika tingkat kepemilikan manajerial tinggi, dapat berdampak buruk terhadap perusahaan karena jika kepemilikan manajerial tinggi, manajer

memiliki posisi yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer. Hal ini terjadi karena tingginya hak voting yang dimiliki manajer (Nur'aeni, 2010). Adanya pengawasan yang optimal terhadap kinerja manajer, maka manajer akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kepemilikan perusahaan oleh institusi akan mendorong pengawasan yang lebih efektif, karena institusi merupakan profesional yang memiliki kemampuan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan.

Pozen (2004) (dikutip dari Nur'aeni, 2010) mengungkapkan beberapa metode yang digunakan oleh pemilik institusional dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, mulai dari diskusi informal dengan manajemen, sampai dengan pengendalian seluruh kegiatan operasional dan pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan oleh institusional yang dalam penelitian ini berasal dari perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank ataupun perusahaan-perusahaan swasta lain akan mendorong peningkatan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen perusahaan.

Lim (2011) (dikutip dari Sabli dan Noor, 2012) menyoroti tentang bagaimana *corporate governance* dengan cara peran aktif investor institusional dapat mengurangi masalah keagenan antara manajemen dan *debtholders* ketika terlibat dalam perencanaan pajak atau kegiatan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Khurana dan Moser (2009) mendapatkan hasil bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang lebih besar akan lebih

agresif pajak. Perusahaan yang lebih agresif pajak, maka *effective tax ratenya* akan lebih rendah.

2.1.3.3 Kepemilikan Publik

Untuk mencapai tujuan utama suatu perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaannya, diperlukan pendanaan untuk menunjang kelangsungan hidup perusahaan yang dapat diperoleh baik melalui pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Masalah pendanaan berpengaruh pada tingkat kapitalisasi modal. Tingkat kapitalisasi modal yang rendah merupakan salah satu alasan kegagalan perusahaan (Gladstone & Gladstone, 2002 dikutip dari Nur'aeni, 2010). Sumber pendanaan eksternal salah satunya dapat diperoleh melalui saham yang dijual kepada masyarakat (publik). Untuk menggerakkan ekonomi secara riil tidak bisa hanya dari konsumsi, secara fundamental diperlukan investasi. Salah satunya adalah pasar modal, terutama untuk memulihkan kepercayaan investor.

Menurut Rosma (2007) (dikutip dari Nur'aeni, 2010) kepemilikan publik menunjukkan besarnya *private information* yang harus dibagikan manajer kepada publik. *Private information* tersebut merupakan informasi internal yang semula hanya diketahui oleh manajer, seperti standar yang dipakai dalam pengukuran kinerja perusahaan, keberadaan perencanaan bonus, dan sebagainya.

Upaya untuk meningkatkan kepemilikan saham oleh publik dilakukan melalui peningkatan dalam pasar modal yang merupakan sumber pembiayaan dunia usaha. Untuk itu pemerintah memberikan insentif pajak berupa fasilitas PPh

bagi WP badan dalam negeri yang berupa Perseroan Terbuka. Hal tersebut diatur oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b) yang berbunyi:

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Persyaratan tertentu lainnya yang dimaksud adalah saham perusahaan tersebut paling sedikit dimiliki oleh 300 pihak, masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor, dan ketentuan tersebut harus dipenuhi dalam waktu minimal 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun pajak (Direktorat Peraturan Perpajakan II, 2012).

Pemerintah sebelumnya juga telah memberikan fasilitas perpajakan yaitu melalui penurunan tarif pajak badan yang ditetapkan oleh pemerintah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b yang berisi tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Pemerintah kemudian melakukan perubahan tarif pajak badan yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a) yang berisi tarif pajak penghasilan wajib pajak badan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki kepemilikan saham oleh publik yang tinggi akan mendapat tarif pajak sebesar 20%

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain (Suwito dan Herawaty, 2005). Perusahaan besar memiliki tingkat penjualan yang lebih tinggi dari perusahaan kecil. Dengan begitu, perusahaan besar cenderung memerlukan dana yang lebih besar untuk dapat mendukung penjualannya. Perusahaan dengan yang tergolong perusahaan besar akan lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari krediturpun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar dianggap memiliki kredibilitas yang lebih baik dan juga memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri.

Semakin besar perusahaan cenderung mempunyai manajemen dan sumber dana yang baik dalam menjalankan perusahaan. Perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan *tax planning* yang baik dengan demikian *effective tax rate* perusahaan menjadi lebih rendah. Namun, perusahaan yang lebih besar tidak selalu dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan *tax planning* dikarenakan ada kemungkinan menjadi sasaran dari keputusan dan kebijakan pemerintah (Hsieh, 2012).

Menurut Richardson dan Lanis (2007) ada dua pandangan yang saling bertentangan mengenai hubungan antara *effective tax rate* (ETR) dan ukuran perusahaan, yaitu *the political cost theory* dan *the political power theory*. *The political cost theory* menyatakan bahwa visibilitas yang lebih tinggi dari

perusahaan yang lebih besar dan lebih sejahtera menyebabkan perusahaan tersebut menjadi korban tindakan regulasi yang lebih besar oleh pemerintah. Sedangkan *the political power theory* menjelaskan hubungan antara perusahaan besar dengan sumber daya yang dimilikinya untuk memanipulasi proses politik dalam melakukan *tax planning* untuk mencapai penghematan pajak yang optimal.

2.1.5 Capital Intensity

Capital intensity atau Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan (Darmadi, 2013). *Capital intensity ratio* juga menunjukkan seberapa besar modal yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan.

Aset tetap pada umumnya akan mengalami penyusutan. Beban penyusutan yang terjadi dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Namun, untuk tujuan tertentu perusahaan dapat membuat kebijakan akuntansi dengan memperlambat waktu penyusutan aset tetap dibandingkan penyusutan menurut pajaknya. Sebagai contoh, Astra Internasional (ASII) yang merupakan salah satu perusahaan dengan aset tetap terbesar di Indonesia memiliki kebijakan mengenai waktu penyusutan yang lebih lama dari penyusutan pajaknya. Astra Internasional menetapkan waktu penyusutan alat pengangkutan sampai 25 tahun, mesin dan peralatan sampai 20 tahun. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan menyatakan bahwa penyusutan maksimal adalah 20 tahun. Untuk

mesin dan peralatan termasuk ke dalam kelompok 3 yaitu penyusutannya selama 16 tahun.

Dengan demikian perusahaan diasumsikan membuat kebijakan waktu penyusutan yang lebih lama dibandingkan dengan penyusutan pajaknya akan membuat laba akuntansi perusahaan menjadi lebih besar dari laba fiskalnya sehingga menimbulkan pajak tangguhan pada periode mendatang. Berdasarkan PSAK 46 revisi 2013 perusahaan tersebut dalam mengakui penyusutan menurut pajaknya menggunakan metode dipercepat (*accelerated*). Penggunaan metode dipercepat oleh perusahaan dalam penyusutan menurut pajak menyebabkan terjadinya perbedaan temporer kena pajak (*taxable*). Perbedaan temporer kena pajak tersebut akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan sehingga *effective tax rate* (ETR) perusahaan juga menjadi meningkat pada periode penelitian.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *effective tax rate* (ETR) telah banyak dilakukan. Namun, belum banyak penelitian yang mengaitkan *effective tax rate* (ETR) dengan jenis-jenis struktur kepemilikan. Berikut adalah uraian beberapa penelitian mengenai *effective tax rate* (ETR).

Penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) dengan judul “*Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia*” menggunakan *effective tax rates* (ETR) sebagai variabel dependen. Sementara variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas aset tetap, intensitas persediaan,

dan intensitas penelitian dan pengembangan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas aset tetap, intensitas penelitian dan pengembangan berpengaruh negatif terhadap *effective tax rates* (ETR). Sementara untuk variabel intensitas persediaan memiliki pengaruh yang positif terhadap *effective tax rates* (ETR).

Sabli dan Noor (2012) menemukan mekanisme *corporate governance* internal dan eksternal tidak mempengaruhi *effective tax rate* perusahaan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *proportion of independent directors* dan *institutional investors* sedangkan variabel kontrol yang digunakan adalah *firm size*, *leverage*, *return on asset* dan *capital intensity ratio*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa direktur independen dalam sebuah perusahaan belum mempunyai pengaruh yang serius dalam keputusan strategis perusahaan terutama dalam kegiatan perencanaan pajak.

Khurana dan Moser (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap *effective tax rate* (ETR). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah *effective tax rate* (ETR). Sedangkan variabel independennya adalah kepemilikan institusional. Hasil penelitian ini menemukan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan umumnya akan lebih agresif pajak. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa perusahaan dengan banyak pemegang saham institusional jangka pendek akan lebih agresif pajak. Sebaliknya perusahaan dengan banyak pemegang saham institusional jangka panjang kurang agresif pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Noor *et al.* (2010) dengan judul “*Tax Planning and Corporate Effective Tax Rates*” menggunakan corporate effective tax rate sebagai variabel dependen. Sementara variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem pajak dan karakteristik perusahaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara corporate effective tax rate (CETR) dengan karakter perusahaan dan sistem pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rusydi dan Martani (2014) dengan judul “*Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Aggressive Tax Avoidance*” menggunakan aggressive tax avoidance sebagai variabel dependen. Sementara variabel independen yang digunakan adalah struktur kepemilikan (keluarga, asing, dan pemerintah). Hasil penelitian ini menemukan bahwa struktur kepemilikan, khususnya kepemilikan yang terkonsentrasi pada keluarga berpengaruh positif terhadap aggressive tax avoidance. Artinya bahwa kepemilikan keluarga ini mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk tidak melakukan aggressive tax avoidance.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014) dengan judul “*Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR)*” menggunakan effective tax rate sebagai variabel dependen. Sementara size, leverage, profitability, capital intensity ratio, dan komisaris independen digunakan sebagai variabel independen. Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel size berpengaruh negatif, variabel komisaris independen berpengaruh positif

sedangkan *leverage*, *profitability*, dan *capital intensity ratio* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *effective tax rate*.

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan bentuk dan hasil penelitian yang berbeda.

Berikut ringkasan penelitian terdahulu pada tabel 2.1

Tabel II.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Richardson dan Lanis (2007)	<i>Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia</i>	Variabel dependen: <i>effective tax rates</i> (ETR) Variabel independen: ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , intensitas aset tetap, intensitas persediaan, dan intensitas penelitian dan pengembangan	Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , intensitas aset tetap, intensitas penelitian dan pengembangan berpengaruh negatif terhadap <i>effective tax rates</i> (ETR) intensitas persediaan memiliki pengaruh yang positif terhadap <i>effective tax rates</i> (ETR).
2	Sabli dan Noor (2012)	<i>Tax Planning and Corporate Governance</i>	Variabel dependen: <i>effective tax rate</i> Variabel independen: <i>proportion of independen directors</i> dan <i>institutional investors</i>	Menemukan hubungan yang tidak signifikan antara corporate governance dan corporate <i>effective tax rate</i> (CETR).

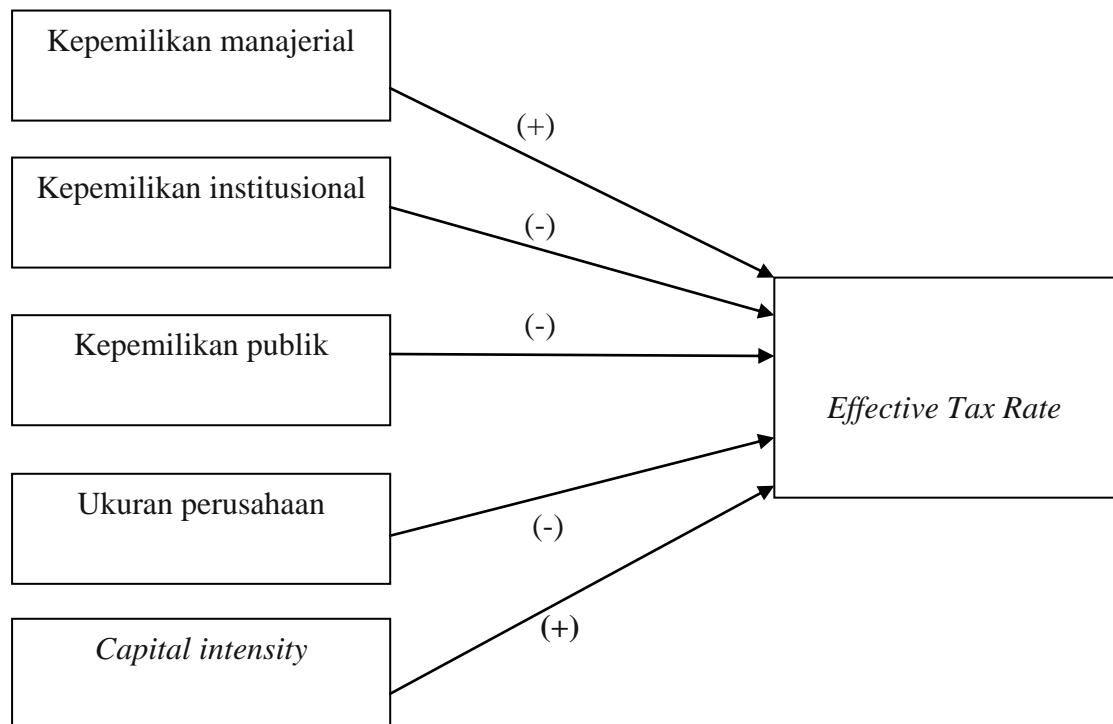
			Variabel kontrol: Firm size, leverage ratio, return on asset (ROA) and capital intensity ratio	
3	Khurana dan Moser (2009)	<i>Institutional Ownership and Tax Aggressiveness</i>	Variabel dependen: <i>effective tax rate</i> (ETR) Variabel independen: kepemilikan institusional	Menemukan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan umumnya akan lebih agresif pajak
4	Noor <i>et al.</i> (2010)	<i>Tax Planning and Corporate Effective Tax Rates</i>	Variabel dependen: <i>corporate effective tax rate</i> sebagai Variabel independen: sistem pajak dan karakteristik perusahaan	Terdapat hubungan yang positif antara corporate effective tax rate (CETR) dengan karakter perusahaan dan sistem pajak
5	Rusydi dan Martani (2014)	<i>Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Aggressive Tax Avoidance</i>	Variabel dependen: <i>aggressive tax avoidance</i> Variabel independen: struktur kepemilikan (keluarga, asing, dan pemerintah)	Struktur kepemilikan, khususnya kepemilikan yang terkonsentrasi pada keluarga berpengaruh positif terhadap <i>aggressive tax avoidance</i>
6	Ardyansah dan Zulaikha (2014)	<i>Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris</i>	Variabel dependen: <i>effective tax rate</i> (ETR) Variabel independen: <i>size</i> ,	<i>Size</i> memiliki pengaruh negatif, komisaris independen memiliki pengaruh positif sedangkan variabel <i>leverage</i> ,

		<i>Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR)</i>	<i>leverage, profitability, capital intensity ratio, dan komisaris independen</i>	<i>profitability, dan capital intensity ratio tidak memiliki pengaruh terhadap ETR</i>
--	--	---	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka terbentuklah kerangka pemikiran dari penelitian ini. Dalam kerangka penelitian ini dijelaskan atau digambarkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut ini adalah kerangka penelitian dalam penelitian ini seperti yang ditampilkan dalam gambar 2.1

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Kepemilikan manajerial dinilai berpengaruh positif terhadap ETR karena manajer akan merasakan langsung dampak dari keputusan yang diambilnya sehingga manajer tidak akan memaksimalkan laba jangka pendek dengan meminimalkan beban pajak. Kepemilikan institusional dinilai berpengaruh negatif terhadap ETR karena prinsipal diasumsikan hanya tertarik dengan tingkat pengembalian sehingga akan berupaya mengarahkan perusahaan untuk meminimalkan beban tanggungan pajaknya. Kepemilikan publik dinilai berpengaruh negatif terhadap ETR karena adanya fasilitas pengurangan pajak sebesar 5% jika perusahaan paling sedikit 40% dimiliki publik. Ukuran

perusahaan dinilai berpengaruh negatif terhadap ETR karena perusahaan yang lebih besar menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan *tax planning* yang baik dengan demikian *effective tax rate* perusahaan menjadi lebih rendah. *Capital intensity* dinilai berpengaruh positif terhadap ETR karena perusahaan diasumsikan menggunakan kebijakan waktu penyusutan yang lebih lama dari pajak sehingga akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan yang membuat ETR menjadi lebih tinggi. Lebih lanjut akan dibahas dalam perumusan hipotesis.

2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Effective Tax Rate*

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham oleh manajemen. Kepemilikan saham manajerial dapat menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer juga akan menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Pujiningsih, 2011). Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham mengakibatkan timbulnya masalah yang biasa disebut *agency problem*. Untuk mengurangi masalah antara manajer dan pemegang saham salah satunya dengan cara meningkatkan kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan.

Cruthley & Hansen (1989) (dikutip dari Wiranata dan Nugrahanti, 2013) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajer akan mendorong penyatuan

kepentingan antara prinsipal dan agen sehingga manajer bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kepemilikan manajer akan saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham diluar manajemen sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sebagai seorang pemilik (Jensen dan Meckling, 1976).

Menurut Anthony dan Govindarajan (2009) pemegang saham akan menghindari risiko dengan mendiversifikasikan kekayaannya ke lembar saham di beberapa perusahaan sedangkan para manajer tidak semudah itu mendiversifikasikan risiko ini. Manajer yang merasakan langsung dampak yang diambil dari keputusannya akan berupaya untuk meningkatkan *image* perusahaan sehingga akan menghindari pengambilan keputusan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Manajer perusahaan akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan, yaitu dengan cara mengungkapkan informasi sosial yang seluas-luasnya untuk meningkatkan *image* perusahaan meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut (Anggraini, 2006 dikutip dari Rustiarini, 2011). Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap *effective tax rate*.

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Effective Tax Rate*

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga antara lain seperti perusahaan investasi,

perusahaan asuransi, bank ataupun perusahaan-perusahaan swasta lain. kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajer (Jensen dan Meckling, 1976).

Dengan adanya investor institusional pemegang saham mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan. Shleifer dan Vishney (1986) (dikutip dari Khurana dan Moser, 2009) menyatakan bahwa investor institusional memainkan peran penting dalam pengawasan, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Lebih lanjut, Shleifer dan Vishney (1986) (dikutip dari Khurana dan Moser, 2009) berpendapat bahwa investor institusional, dengan kepemilikan saham yang besar dan hak suara, dapat memaksa manajer untuk fokus pada kinerja perusahaan dan menghindari peluang untuk mementingkan kepentingan pribadinya, investor institusional juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa perusahaan mengambil keputusan-keputusan yang akan memaksimalkan kekayaan pemegang saham.

Semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh institusional membuat pengawasan terhadap manajemen juga akan meningkat. Keputusan yang diambil manajemen akan sesuai dengan keinginan pemegang saham. Menurut Anthony dan Govindarajan (2009) berdasarkan teori keagenan prinsipal diasumsikan hanya tertarik dengan tingkat pengembalian atas investasi yang ditanamkan pada perusahaan. Hal tersebut membuat pemegang saham akan berusaha sebisa

mungkin mengarahkan perusahaan untuk meminimalkan beban tanggungan pajaknya. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate*.

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap *Effective Tax Rate*

Untuk menunjang kelangsungan hidupnya, perusahaan memerlukan pendanaan yang memadai baik berasal dari internal perusahaan maupun eksternal. Pendanaan eksternal yang bisa didapat perusahaan salah satunya berasal dari saham yang dijual kepada masyarakat (publik). Menurut Rosma (2007) (dikutip dari Nur'aeni, 2010) kepemilikan publik menunjukkan besarnya *private information* yang harus dibagikan manajer kepada publik. *Private information* tersebut merupakan informasi internal yang semula hanya diketahui oleh manajer, seperti standar yang dipakai dalam pengukuran kinerja perusahaan, keberadaan perencanaan bonus, dan sebagainya.

Adanya insentif pajak berupa fasilitas PPh bagi WP badan dalam negeri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b) yaitu wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan saham perusahaan tersebut paling sedikit dimiliki oleh 300 pihak, masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif pajak

badan yang telah diatur yaitu 25% (dua puluh lima persen). Dengan demikian perusahaan dengan kepemilikan publik yang lebih besar akan memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kepemilikan publik memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate*.

2.4.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Effective Tax Rate*

Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain (Suwito dan Herawaty, 2005). Perusahaan besar memiliki tingkat penjualan yang lebih tinggi dari perusahaan kecil. Dengan begitu, perusahaan besar cenderung memerlukan dana yang lebih besar untuk dapat mendukung penjualannya. Perusahaan dengan yang tergolong perusahaan besar akan lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari krediturpun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar dianggap memiliki kredibilitas yang lebih baik dan juga memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri.

Menurut Nicodème (2007) perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Semakin besar perusahaan cenderung mempunyai manajemen dan sumber dana yang baik dalam menjalankan perusahaan. Perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan *tax planning* yang baik dengan demikian *effective tax*

rate perusahaan menjadi lebih rendah. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate*.

2.4.5 Pengaruh Capital Intensity Terhadap Effective Tax Rate

Capital intensity atau Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan (Darmadi, 2013). *Capital intensity* juga menunjukkan seberapa besar modal yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan.

Aset tetap pada umumnya akan mengalami penyusutan. Beban penyusutan yang terjadi dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Namun, untuk tujuan tertentu perusahaan dapat membuat kebijakan akuntansi dengan memperlambat waktu penyusutan aset tetap dibandingkan penyusutan menurut pajaknya. Dengan asumsi perusahaan membuat kebijakan waktu penyusutan yang lebih lama dibandingkan dengan penyusutan pajaknya akan membuat laba akuntansi perusahaan menjadi lebih besar dari laba fiskalnya sehingga menimbulkan pajak tangguhan pada periode mendatang. Berdasarkan PSAK 46 revisi 2013 perusahaan tersebut dalam mengakui penyusutan menurut pajaknya menggunakan metode dipercepat (*accelerated*). Penggunaan metode dipercepat oleh perusahaan dalam penyusutan menurut pajak menyebabkan terjadinya perbedaan temporer kena pajak (*taxable*). Perbedaan temporer kena pajak tersebut akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan

sehingga *effective tax rate* (ETR) perusahaan juga menjadi meningkat pada periode penelitian. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: *Capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *effective tax rate*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan oleh variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *effective tax rate* (ETR). *Effective tax rate* (ETR) dapat digunakan sebagai indikator perencanaan pajak yang efektif. Dengan demikian *effective tax rate* merupakan ukuran terbaik untuk mengevaluasi beban pajak perusahaan yang sebenarnya. *Effective tax rate* dapat dihitung dari total beban pajak penghasilan (beban pajak kini ditambah dengan beban pajak tangguhan) dibagi dengan laba sebelum pajak sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan publik, ukuran perusahaan, dan *capital intensity*.

3.1.2.1 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial menunjukkan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris dalam sebuah perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Saham yang Dimiliki Manajemen}}{\text{Total Saham}} \times 100\%$$

3.1.2.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga antara lain seperti perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank ataupun perusahaan-perusahaan swasta lain. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajer (Jensen dan Meckling, 1976). Kepemilikan institusional diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham yang Dimiliki Institusi Lain}}{\text{Total Saham}} \times 100\%$$

3.1.2.3 Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik menunjukkan besarnya persentase saham yang dimiliki oleh publik. Kepemilikan publik merupakan sumber pendanaan eksternal perusahaan yang diperoleh dengan melakukan penjualan saham kepada

masyarakat. Kepemilikan publik menunjukkan proporsi kepemilikan saham oleh masyarakat dalam sebuah perusahaan, di mana masing-masing kepemilikannya kurang dari 5%.

Adanya insentif pajak yang berupa pengurangan tarif pajak sebesar 5% dari tarif pajak yang berlaku atas kepemilikan publik minimal 40% dari keseluruhan saham, maka pengukuran kepemilikan publik pada penelitian ini menggunakan variabel dummy. Menurut Ghozali (2011), jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberi kode 0 (nol) atau 1 (satu). Kelompok yang diberi nilai dummy 0 (nol) disebut *excluded group*, sedangkan kelompok yang diberi nilai dummy 1 (satu) disebut *included group*. Variabel kepemilikan publik pada penelitian ini dikategorikan menjadi dua yaitu:

1: kepemilikan saham oleh publik sebesar 40% atau lebih

0: kepemilikan saham oleh publik kurang dari 40%

3.1.2.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan tingkat ukuran besar kecilnya suatu perusahaan. Untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan dapat dihitung dari jumlah asetnya karena ukuran perusahaan diproksikan dengan *natural log* dari total aset. Penggunaan *natural log* pada penelitian ini bertujuan untuk mengurangi fluktuasi data tanpa mengubah proporsi nilai asal. Ukuran perusahaan diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

3.1.2.5 *Capital Intensity*

Capital intensity atau rasio intensitas aset tetap adalah perbandingan aset tetap terhadap total aset sebuah perusahaan. Rasio intensitas aset tetap menggambarkan proporsi aset tetap perusahaan pada keseluruhan aset yang dimiliki sebuah perusahaan. Rasio intensitas aset tetap diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2013. Alasan memilih perusahaan manufaktur adalah karena industri manufaktur merupakan industri dengan jumlah perusahaan terbanyak dibandingkan dengan industri lain sehingga diharapkan mampu merepresentasikan keadaan di Indonesia, dan untuk menghindari efek bias industri.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria tertentu agar sampel yang terpilih lebih representatif.

Berikut adalah kriteria-kriteria pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dalam penelitian ini:

1. Perusahaan mengeluarkan *annual report* dan data keuangan yang lengkap yang berakhir pada tanggal 31 Desember selama periode 2011-2013. Perusahaan tidak mengalami *delisting* selama periode tersebut.
2. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode 2011-2013. Dikarenakan perusahaan yang mengalami kerugian nilai ETRnya akan menjadi negatif.
3. Laporan keuangan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Dikarenakan penelitian dilakukan di Indonesia, maka laporan keuangan yang digunakan adalah yang dinyatakan dalam rupiah.
4. Perusahaan memiliki kepemilikan saham manajerial, institusional, dan publik secara bersamaan.
5. Perusahaan memiliki semua komponen data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan jenis sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2013.

Data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia atau dari *website* milik Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id, serta sumber lain yang relevan seperti dari *website* perusahaan dan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan :

1. Studi pustaka

Metode studi pustaka yaitu metode dengan melakukan telaah pustaka, eksplorasi dan mengkaji berbagai literature pustaka seperti buku-buku, jurnal, masalah, literatur, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode mengumpulkan data dengan cara mencatat dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Pencatatan data yang berhubungan dengan variabel yang diteliti.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum (Ghozali, 2011). Analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan karakteristik data dari sampel yang digunakan.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan memenuhi syarat atau tidak. Terdapat 4 cara untuk melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual terdistribusi normal (Ghozali, 2011). Jika nilai residual tidak berdistribusi normal, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Terdapat 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.

2. Analisis Statistik

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati, karena secara visual kelihatan normal. Oleh sebab itu sebaiknya uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dilakukan dengan melihat angka probabilitasnya dengan ketentuan (Ghozali, 2011) :

1. Nilai signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$, maka distribusi dikatakan tidak normal.
2. Nilai signifikansi atau nilai probabilitasnya $> 0,05$, maka distribusi dikatakan normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Matriks korelasi variabel-variabel independen.

Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas (Ghozali, 2011).

2. Nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF).

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Cutoff* yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2011).

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

Dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) untuk menguji autokorelasi dari model regresi penelitian. Uji Durbin-Watson ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya *intercept*

(konstanta) dan tidak ada variabel *lag* diantara variabel independen (Ghozali, 2011). Hipotesis yang akan diuji adalah:

H_0 : Tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_A : Ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi seperti yang ditampilkan tabel

3.1

Gambar 3.1

Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Korelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau yang homoskedastisitas.

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Salah satunya adalah dengan melihat pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara residualnya dengan variabel terikat. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi berganda atau *multiple regression analysis*. Adapun model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 KMAN + \beta_2 KINS + \beta_3 KPUB + \beta_4 SIZE + \beta_5 CINT + e$$

Keterangan:

ETR = *Effective tax rate*

α = Konstanta

β = Koefisien variabel

KMAN = Kepemilikan manajerial terhadap total saham perusahaan

KINS = Kepemilikan institusional terhadap total saham perusahaan

KPUB = Kepemilikan publik terhadap total saham perusahaan

SIZE = Ukuran perusahaan yang diprosikan dengan ln (total aset)

CINT = *Capital Intensity*, total aset tetap dibagi dengan total aset

e = Error

Dengan persamaan statistik di atas, hipotesis alternatif akan diterima dengan tingkat signifikansi 5%. Apabila tingkat sig dari hasil analisis lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis penelitian diterima.

3.5.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

Kelemahan mendasar koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. oleh karena penelitian ini menggunakan banyak variabel independen, maka penelitian ini menggunakan *adjusted R²* karena lebih tepat untuk mengukur seberapa jauh variabel dependen diterangkan oleh variabel – variabel independen.

3.5.3.2 Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2011). Uji signifikansi F dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan kriteria penolakan atau penerimaan hipotesis sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ berarti semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ berarti semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.3.3 Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Adapun penerimaan atau penolakan hipotesis dalam uji t berdasarkan pada kriteria berikut:

1. Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.